



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang

Dalam sebuah acara silaturahmi dengan perwakilan SMA/SMK/MA mahasiswa se-Sumatera Barat pada 8 Juni 2013, Wakil Presiden Republik Indonesia menjawab salah satu pertanyaan dari siswa SMAN 1 Padang bernama Asrul tentang neolib. Isu neolib ialah isu yang ditanamkan kepada Boediono pada masa awal pencalonan dirinya dengan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pilpres 2009. Asrul menanyakan bagaimana tanggapan Boediono terkait neolib serta stigma negatif dirinya sebagai pemimpin negara yang dicap menjual aset negara termasuk BUMN (detik.com : 8 Juni 2013).

Seperti yang dikutip dari artikel situs Detik di bulan Juni tahun 2013, Boediono menanggapi dengan menyatakan bahwa neoliberalisme hanyalah ideologi. Bagi Boediono dalam praktek kebijakan ekonomi tidak ada satu pun negara yang sepenuhnya menerapkan hal itu. Menurutnya, seseorang jangan sampai terperangkap pada perdebatan ideologis (detik.com : 8 Juni 2013)

Hal serupa juga diberitakan dalam artikel portal berita Antaranews pada Juni 2013, yang mana Boediono mengakui maraknya investor asing di Indonesia karena mereka memiliki modal kuat dan teknologi yang mumpuni. Indonesia harus

menerima realitas hingga saat ini belum mampu mengebor migas di lepas pantai sehingga kemampuan teknologi perusahaan asing sangat dibutuhkan.

Pertanyaan yang lugas dari Asrul setelah empat tahun masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono pasca Pilpres 2009 membuktikan isu neoliberalisme masih menjadi topik yang hangat diliput dan diberitakan oleh media pada masa kini. Ini terbukti dengan masih terulang stigma Boediono sebagai pemimpin neolib di tengah masyarakat dan diwacanakan oleh media meski sudah melewati tahun pemilihan 2009.

Predikat 'pemimpin neolib' yang ditempelkan kepada Boediono mewarnai hari-hari pencawapresan dengan demonstrasi penolakan terhadapnya oleh mahasiswa dari organisasi masyarakat seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) di Jakarta dalam peringatan setahun kepemimpinan SBY-Boediono (Tribunnews : 20 Oktober 2010). Fenomena seperti ini tidak menutup kemungkinan akan kembali hangat menjelang Pilpres 2014. Wacana neoliberalisme menjelang Pilpres berpotensi besar terulang dan menguat apabila dikaitkan antara kepemimpinan nasional dengan kebijakan ekonomi nasional yang dibuat pemimpin demi kesejahteraan rakyat.

Menurut Herry Priyono (2006 : 2) dalam Pidato Kebudayaan, neoliberalisme adalah bentuk pemahaman baru kaum Liberal dalam menjawab tantangan zaman yang gagal diatasi oleh Liberalisme. Maka, penambahan kata 'neo' dalam Liberalisme ini berarti baru dan definisi neoliberalisme antara lain;

“neoliberalisme ada dua definisi. Pertama, neoliberalisme adalah paham/agenda pengaturan masyarakat yang didasarkan pada dominasi *homo economicus* atas dimensi lain dalam diri manusia (*homo cultaris, zoon politikon, homo socialis, dsb*). Kedua, sebagai kelanjutan pokok pertama, neoliberalisme kemudian juga bisa dipahami sebagai dominasi sektor finansial atas sektor riil dalam tata ekonomi politik.”

Menurut Prasetyo (2004 : 4) dalam jurnal *Al-Manar*, neoliberalisme adalah reaksi terhadap membesarnya peran negara terhadap sistem pasar. Neoliberalisme hendak memberikan jalan keluar yakni melucuti peran negara dan mengembalikan semua transaksi ekonomi terhadap hukum pasar (Prasetyo, 2004 : 4).

Inilah alasan paham neoliberalisme sangat erat dikaitkan dengan sosok kepemimpinan nasional di suatu negara. Begitupun sebaliknya dengan paham anti neoliberalisme atau kedaulatan ekonomi nasional dengan figur kepemimpinan nasional di suatu negara. Pengambilan kebijakan terbesar terkait sistem pasar dan perekonomian ada di tangan pemimpin negara. Konteks neoliberalisme dan kritik terhadapnya pun masih akan tetap menjadi fokus laporan di media massa menuju Pilpres 2014. Oleh sebab itu kebenaran dari konteks neoliberalisme adalah pertanyaan khusus dalam dunia politik kepemimpinan.

Kebenaran wacana yang disajikan oleh media pasca reformasi khususnya pada Pilpres 2009, neoliberalisme adalah bentuk kebijakan yang membebaskan

transaksi politik maupun ekonomi yang tak lepas dari akarnya, liberalisme. Wacana ini mengerucut pada anti intervensi pemerintah dan anti subsidi (Hidayatullah : 2009).

Kebenaran dalam sebuah wacana berita sebenarnya bukan kebenaran mutlak, masih ada sisi lain yang sengaja tidak terangkat oleh media. Menurut pandangan kritis, teks berita bukanlah menggambarkan realitas sesungguhnya disebabkan banyaknya faktor-faktor internal, eksternal, sosial politik yang mempengaruhi produksi teks berita. Dalam suatu teks selalu ada representasi tertentu yang lebih dominan ingin ditonjolkan dan di pihak lain dibenamkan (Eriyanto : 2001).

Keberadaan dan kebenaran wacana terkait erat dengan kekuasaan dan pendefinisi kebenaran yang tentunya adalah penguasa. Disinilah media sebagai pencipta dan pembawa wacana menanamkan kepentingan-kepentingan penguasa dibalik membawa kepentingan publik.

Media berkewajiban mentransfer informasi kebijakan perekonomian Indonesia ke masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral jurnalisme kepada publik. Hal ini sejalan pernyataan yang tertera dalam *Sembilan Elemen Jurnalisme*, di dua poin awal bahwa “jurnalisme berkewajiban mencari kebenaran dan loyalitas jurnalisme adalah pada warga negara” (Kovach & Rosenstiel : 2001).

Seperti yang dikutip pula dalam orasi kebudayaan *‘Media Sebagai Panglima’* oleh Seno Gumira Ajidarma pada malam penutupan Pesta Media 2013, “media bukanlah kenyataan, media adalah konstruksi kenyataan, dengan

pencapaian yang sangat berdaya” (Ajidarma : 2013). Menurut Seno, media nyaris merupakan ilusi kenyataan yang sempurna dan menjadi situs perjuangan berbagai kelompok, untuk menancapkan versi kenyataan menurut kepentingannya masing-masing, dalam suatu proses hegemoni tanpa akhir. Dalam proses sosial politik semacam itulah, berlangsung perlawanan kelompok terbawahkan maupun negosiasi kelompok dominan terhadap perlawanan itu, agar dalam konsensus sosial dari saat ke saat, dominasi wacana kelompoknya tetap bertahan (Ajidarma : 2013).

Kini telah beredar sejak akhir 2012 sebuah majalah terobosan baru yang diterbitkan menjelang pesta demokrasi. Majalah Indonesia 2014, sebagai salah satu media yang tentu akan berperan memainkan isu dengan kemampuannya mengkonstruksi kenyataan. Majalah ini lahir dari inisiatif Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan dewan redaksi demi mencari calon pemimpin Indonesia 2014.

Dalam konteks neoliberalisme majalah ini seolah menjadi pemantik api dengan menawarkan perdebatan akan gagasan pasar bebas dengan bertujuan membuat gerakan menghapuskan pesimisme masyarakat akan kepemimpinan di Indonesia. Misi gerakan dan majalah Indonesia 2014 ini adalah mencari pemimpin alternatif dan kemudian mempromosikannya ke tengah publik.

Menurut pernyataan dari Majalah Indonesia 2014 melalui website mereka, [www.indonesia-2014.com](http://www.indonesia-2014.com) bahwa pencarian calon-calon itu sudah dimulai sejak awal 2012. Proses yang dilakukan dengan survei dan mendiskusikan beberapa nama dengan beberapa ahli sarjana, dosen, peneliti, tentara, pengusaha, dan tokoh nasional.

Harapan redaksi Indonesia 2014 ini sesungguhnya ialah mendapatkan satu orang kandidat yang dipilih rakyat berdasarkan rekomendasi para ahli dan kaum terpelajar atau kaum intelektual Indonesia. Dimana kaum intelektual ini ternilai cukup kredibel dalam memberikan pendidikan dan pengarahan. Redaksi Indonesia 2014 mengenali ada kesenjangan pemahaman dari kaum intelektual dengan masyarakat Indonesia yang terbilang awam. Keinginan ideal ini tidak mudah untuk diwujudkan maka Indonesia 2014 berkeinginan untuk menjembatani jurang itu dengan mengampanyekan calon-calon pilihan lewat berbagai media.

Latar belakang Majalah Indonesia 2014 ini mendorong peneliti untuk menganalisis lebih jauh perihal wacana neoliberalisme dalam kepemimpinan nasional. Peneliti tertarik meneliti wacana neoliberalisme karena pertama, isu neoliberalisme seperti siklus yang terus berulang baik secara pro maupun kontra di tengah masyarakat yang tengah menghadapi tahun politik menuju regenerasi pemimpin negara. Hal ini terbukti dengan pertanyaan Asrul kepada Boediono terkait stigma dirinya sebagai pemimpin neolib. Kedua, neoliberalisme sebagai sebuah gagasan yang berkekuatan dalam menetapkan kebijakan ekonomi dan politik publik sehingga menjadi salah satu aset mengukur kesuksesan dalam upaya kesejahteraan rakyat.

Dalam posisi ini media sebagai penyampai pesan tentu akan mengambil sikap menghadapi neoliberalisme tanpa melupakan faktor-faktor internal, eksternal, sosial politik yang mempengaruhi produksi teks berita. Majalah Indonesia 2013 pun hadir sebagai salah satu media yang mewacanakan kepemimpinan nasional dan

neoliberalisme. Isu neoliberalisme dalam media tersebutlah yang menjadi alasan ketiga peneliti mengungkap kebenaran dalam sebuah wacana berita maupun opini dalam majalah Indonesia 2014. Hal ini mengingat sebenarnya bukan kebenaran mutlaklah yang ada di media, demikian halnya pula dengan majalah Indonesia 2014 dan wacana neoliberalisme dalam kepemimpinan nasional yang diusungnya. Masih ada sisi lain di majalah Indonesia 2014 dalam mengangkat wacana memilih ‘pemimpin neolib’ atau ‘pemimpin pro ekonomi kerakyatan’ yang secara sengaja diangkat maupun tidak diangkat atau dibenamkan oleh media tentu tergantung pada siapa yang berdiri dibelakang media tersebut.

## **1. 2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas tentang latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1.2.1. Bagaimana artikel opini pada rubrik *Wacana* di *Majalah Indonesia 2014 Edisi III tahun 2013* mewacanakan neoliberalisme dalam kepemimpinan nasional 2014-2019?

1.2.2. Apa latar belakang artikel opini pada rubrik *Wacana* di *Majalah Indonesia 2014 Edisi III tahun 2013* mewacanakan neoliberalisme dalam kepemimpinan nasional 2014-2019?

### **1. 3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan sebelumnya oleh peneliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut;

1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana rubrik *Wacana* di Majalah Indonesia 2014 mewacanakan neoliberalisme dalam kepemimpinan nasional 2014-2019.

1.3.2. Untuk mengetahui alasan rubrik *Wacana* di Majalah Indonesia 2014 mewacanakan neoliberalisme dalam kepemimpinan nasional 2014-2019.

### **1. 4. Batasan Masalah**

Tidak semua wacana dalam produksi teks opini di Majalah Indonesia 2014 akan ditelaah oleh peneliti. Dari tiga wacana yang dimuat pada edisi tersebut, peneliti hanya akan mengambil dua artikel untuk diteliti.

Peneliti membatasi artikel yang ditelaah dan hanya memilih dua artikel akibat pertimbangan untuk wajib memenuhi dimensi kognisi sosial dari para penulis tulisan wacana atau opini masing-masing.

## **1. 5. Signifikansi Penelitian**

### **1. 5. 1. Signifikansi Akademis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu komunikasi khususnya bidang jurnalistik terkait dengan wacana neoliberalisme yang masih terjadi. Penelitian ini mampu menunjukkan upaya-upaya media dalam menghadapi kondisi ekonomi Indonesia dengan neoliberalisme dalam kepemimpinan nasional yang ideal. Serta mengungkap proses pembentukan dan penyusunan wacana secara terselubung maupun terbuka melalui produksi teks.

### **1. 5. 2. Signifikansi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan gambaran kepada khalayak terkait wacana neoliberalisme. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi, baik Universitas Multimedia Nusantara maupun perguruan tinggi lain, serta masyarakat luas yang tertarik dengan wacana neoliberalisme dalam rubrik baru *Wacana* di Majalah Indonesia 2014 dengan menggunakan metode analisis wacana kritis.